



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRE AZKI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 947488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	97.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.		
2.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.		
95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.095.280
F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000
Sub Total	Rp.	140.595.280
III. HUTANG	Rp.	80.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	59.995.280

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULMAN HENDRIZAL
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 962577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	20.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, Rp. 20.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	38.000.000
1. MOTOR, HONDA METIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA METIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	252.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	76.752.000
III. HUTANG	Rp.	203.625.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-126.873.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AL AZHAR RASYIDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622372

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU SANGKAR, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.230.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.230.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 636.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.445.339

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.407.675.339

III. HUTANG Rp. 110.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.297.675.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARMESYONI**
2. Jabatan : **PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **947485**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 335.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 639 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 280.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.829.512

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 946.829.512

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 946.829.512

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.